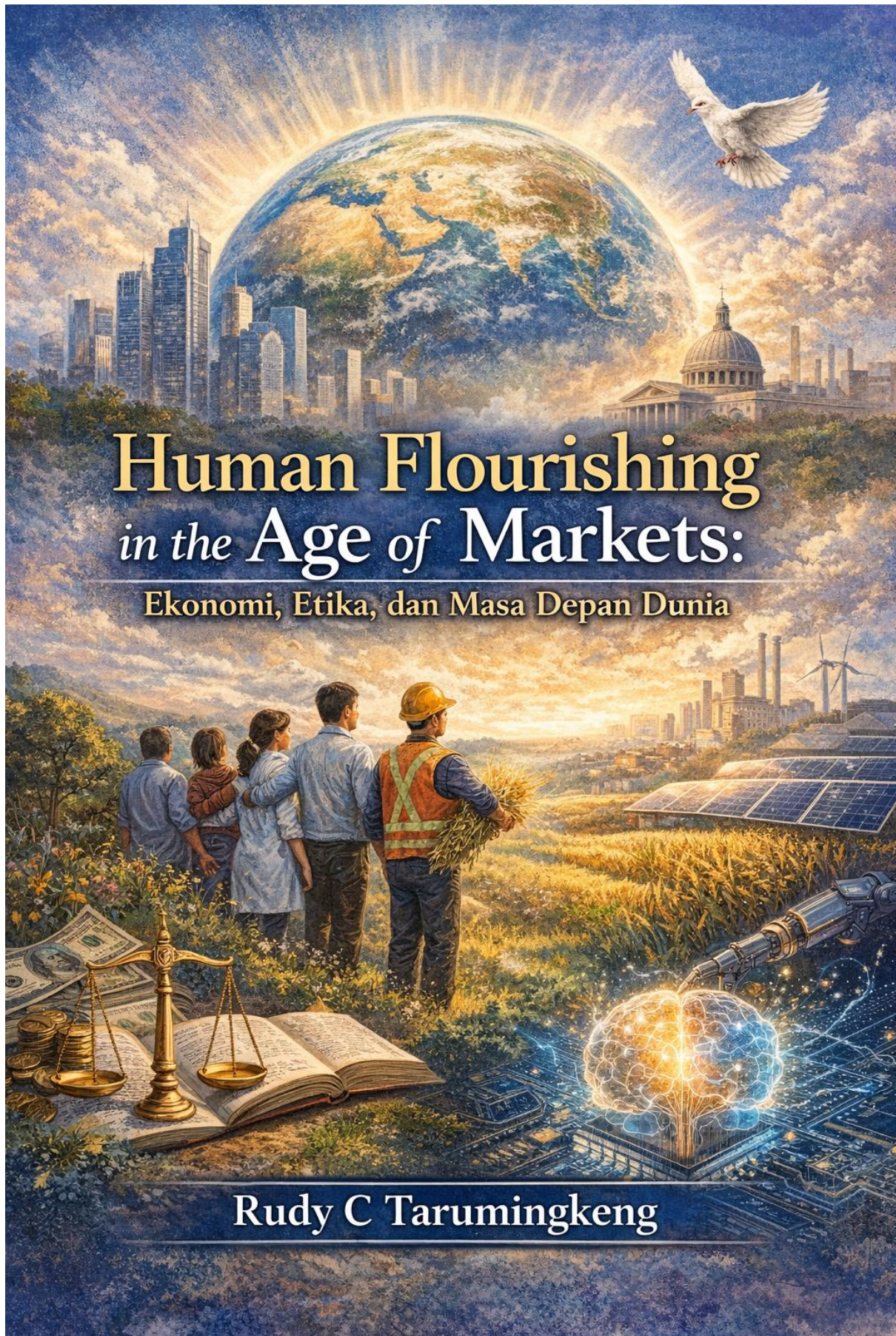




Rudy C Tarumingkeng: **Human Flourishing in the Age of Markets:
Ekonomi, Etika, dan Masa Depan Dunia**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

13 April 2026

HUMAN FLOURISHING IN THE AGE OF MARKETS: EKONOMI, ETIKA, DAN MASA DEPAN DUNIA

Abstrak

Makalah ini membahas kembali tujuan pembangunan dunia dalam era ketika pasar global, teknologi digital, kecerdasan buatan, krisis iklim, ketimpangan, dan tekanan fiskal membentuk ulang kehidupan manusia secara mendasar. Tesis utama makalah ini adalah bahwa pasar penting, negara tetap vital, tetapi keduanya harus ditempatkan di bawah horizon normatif yang lebih tinggi, yaitu *human flourishing* atau keberhasilan hidup manusia secara utuh. Pembangunan tidak boleh direduksi menjadi pertumbuhan output, akumulasi kapital, atau efisiensi semata. Pembangunan harus diukur dari sejauh mana manusia sungguh dapat hidup sehat, aman, berdaya, produktif, bermakna, serta memiliki ruang kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya. Di tengah perlambatan pertumbuhan global, stagnasi pengurangan kemiskinan, tingginya informalitas kerja, krisis pembiayaan pembangunan, dan beban utang yang menekan negara berkembang, agenda pembangunan membutuhkan penataan ulang yang serius. Makalah ini menggabungkan perspektif ekonomi politik, etika sosial, pembangunan manusia, dan tata kelola global untuk menunjukkan bahwa pasar yang tidak dibingkai etika akan cenderung mengkomodifikasi manusia, sementara negara yang tidak dibatasi akuntabilitas berpotensi menjadikan manusia sekadar objek administrasi. Karena itu, masa depan dunia membutuhkan sintesis baru: pasar yang inovatif tetapi dibatasi oleh keadilan, negara yang kuat tetapi tunduk pada kepentingan umum, dan kebijakan pembangunan yang memusatkan manusia sebagai tujuan akhir. Dengan bertolak dari

perkembangan global mutakhir dan refleksi teoretis, makalah ini menawarkan kerangka pembangunan yang menggabungkan pekerjaan layak, perlindungan sosial, transisi hijau yang adil, tata kelola teknologi yang humanis, dan ukuran kemajuan yang melampaui Produk Domestik Bruto. Laporan-laporan resmi terbaru menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan global masih terlalu lambat: lebih dari 800 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2025, hampir 700 juta orang hidup di bawah garis US\$2,15 per hari, dan kesenjangan pembiayaan SDGs di negara berkembang telah mencapai sekitar US\$4 triliun per tahun. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan utama dunia bukan hanya kekurangan sumber daya, melainkan kekeliruan orientasi pembangunan itu sendiri.

Kata kunci: *human flourishing, pasar, negara, etika ekonomi, pembangunan manusia, keadilan sosial, ketimpangan, pekerjaan layak, AI, masa depan dunia*

Pendahuluan

Pada abad ke-21, dunia tampak semakin kaya tetapi tidak selalu semakin tenteram. Banyak negara berhasil memperluas produksi, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan konektivitas global. Namun di balik kemajuan itu, muncul kegelisahan yang semakin luas: biaya hidup meningkat, pekerjaan menjadi lebih rapuh, rumah tangga makin rentan terhadap guncangan, polarisasi sosial menguat, dan bumi sendiri menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekologis. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi sekadar “bagaimana mempercepat pertumbuhan?”, melainkan “pertumbuhan untuk apa, dan bagi siapa?”

Pertanyaan itu menjadi sangat relevan karena model pembangunan yang dominan selama beberapa dekade terlalu menaruh kepercayaan pada pasar sebagai mesin utama kemakmuran. Pasar memang memiliki

kekuatan besar: ia mengoordinasikan produksi, memberi insentif inovasi, mempercepat pertukaran, dan mendorong efisiensi. Akan tetapi, pasar bukan kompas moral. Ia mengetahui harga, tetapi tidak selalu mengetahui nilai. Ia dapat menghitung keuntungan, tetapi tidak secara otomatis melindungi martabat. Dalam ruang itulah peran negara, masyarakat sipil, dan etika menjadi sangat penting.

Tema *human flourishing* memberi kita bahasa yang lebih kaya daripada sekadar “kesejahteraan” dalam arti material. Yang dimaksud di sini bukan hanya hidup dengan pendapatan yang cukup, tetapi hidup yang memungkinkan manusia bertumbuh secara utuh: sehat, terdidik, aman, dihormati, memiliki relasi sosial yang bermakna, kesempatan berkarya, dan ruang untuk mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Dalam horizon ini, ekonomi seharusnya menjadi alat bagi kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang baik ditundukkan pada logika ekonomi.

Urgensi untuk meninjau ulang tujuan pembangunan semakin kuat ketika kita melihat keadaan global terkini. IMF menilai pertumbuhan global pada 2025 melemah di tengah pergeseran kebijakan, ketegangan dagang, dan ketidakpastian baru, sementara risiko terhadap prospek ekonomi tetap condong ke sisi bawah. Pada saat yang sama, Bank Dunia menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan global melambat hampir sampai titik berhenti, dan dunia tidak berada pada jalur yang memadai untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2030. Laporan SDGs 2025 pun menekankan bahwa konflik, perubahan iklim, tekanan utang, dan kesenjangan pembiayaan yang sangat besar terus menghambat kemajuan pembangunan. ([IMF](#))

Dengan latar seperti itu, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pembangunan dunia perlu diarahkan ulang dari paradigma yang terlalu sempit—yang berpusat pada pertumbuhan dan efisiensi—ke paradigma yang lebih utuh, yaitu *human flourishing*. Pembahasan akan bergerak dari analisis mengenai pasar dan negara, menuju landasan etika

pembangunan, tantangan global mutakhir, dan akhirnya kerangka normatif bagi masa depan dunia yang lebih manusiawi.

Human Flourishing: Dari Kemakmuran Material ke Kehidupan yang Bernilai

Konsep *human flourishing* berakar panjang dalam filsafat moral. Dalam tradisi Aristotelian, kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari kepemilikan barang, tetapi dari tercapainya kualitas hidup yang memungkinkan manusia menjalankan potensinya secara luhur. Dalam bahasa modern, gagasan ini diperkaya oleh pemikiran pembangunan manusia, terutama melalui penekanan pada kebebasan, kapabilitas, dan kualitas hidup yang bernilai.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara pendekatan *human flourishing* dan pendekatan ekonomi yang terlalu sempit. Pendekatan yang sempit cenderung menganggap manusia sebagai agen produksi dan konsumsi. Sementara itu, pendekatan *human flourishing* melihat manusia sebagai subjek moral, warga, anggota keluarga, makhluk relasional, sekaligus pencipta makna. Seorang manusia tidak selesai dijelaskan hanya oleh pendapatan per kapitanya. Ia juga dibentuk oleh kesehatannya, pendidikannya, rasa amannya, relasinya, lingkungannya, bahkan harapannya atas masa depan.

Laporan *Human Development Report 2025* dari UNDP sangat selaras dengan gagasan ini. Laporan tersebut menegaskan bahwa tujuan pembangunan manusia adalah agar manusia dapat menjalani kehidupan yang mereka hargai dan memiliki alasan untuk menghargainya. Dalam konteks AI, laporan itu justru menekankan bahwa masa depan pembangunan tidak terutama ditentukan oleh apa yang bisa dilakukan teknologi, melainkan oleh pilihan manusia dalam membentuk ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain, dunia yang lebih canggih belum tentu dunia yang lebih manusiawi; hasil akhirnya bergantung pada arah politik dan etikanya. ([Human Development Reports](#))

Konsep *human flourishing* juga membantu kita menghindari jebakan reduksionisme kebijakan. Ketika pemerintah, perusahaan, atau lembaga internasional hanya mengejar pertumbuhan, produktivitas, dan daya saing, mereka mudah mengabaikan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah manusia sungguh hidup lebih baik? Apakah pekerjaan yang tercipta membuat hidup lebih stabil atau justru lebih rapuh? Apakah kemajuan digital memperluas kebebasan atau memperdalam pengawasan? Apakah investasi yang besar memperkuat komunitas atau justru menggesernya?

Di sinilah relevansi etika. Ekonomi tanpa etika bisa sangat efisien dalam menghasilkan kemakmuran yang tidak adil. Politik tanpa etika bisa sangat canggih dalam mengelola masyarakat tanpa memuliakan manusia. Maka, *human flourishing* bukan hiasan moral tambahan, melainkan titik orientasi yang seharusnya membingkai seluruh kegiatan ekonomi dan kebijakan publik.

Pasar sebagai Sarana, Bukan Tujuan

Pasar adalah salah satu pencapaian kelembagaan terbesar dalam sejarah modern. Melalui mekanisme harga, ia memungkinkan koordinasi jutaan keputusan tanpa pusat komando tunggal. Ia mempercepat inovasi, menghubungkan produsen dan konsumen, serta membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam banyak situasi. Karena itu, kritik terhadap pasar tidak boleh jatuh pada romantisme anti-pasar yang naif.

Namun pasar mempunyai keterbatasan moral dan sosial yang serius. Pasar merespons daya beli, bukan selalu kebutuhan manusia yang paling mendesak. Ia tidak otomatis memberi prioritas pada mereka yang paling rentan, melainkan pada mereka yang dapat membayar. Dalam kerangka ini, kesehatan, pendidikan, air bersih, perumahan, dan bahkan perhatian sosial dapat berubah menjadi komoditas. Ketika itu terjadi, manusia perlahan dinilai bukan dari martabatnya, melainkan dari nilainya di dalam transaksi.

Fenomena ini terlihat jelas dalam banyak sektor kontemporer. Dalam ekonomi digital, misalnya, pekerja platform sering dipuji sebagai simbol fleksibilitas modern. Tetapi di balik fleksibilitas itu sering tersembunyi ketidakpastian penghasilan, absennya jaminan sosial, lemahnya perlindungan kerja, dan ketergantungan pada algoritme yang tidak transparan. Dalam sistem seperti ini, risiko dipindahkan dari perusahaan ke pekerja, sementara efisiensi dipersepsikan sebagai kebajikan utama. Secara ekonomi, sistem itu bisa tampak rasional; secara etik, ia menyisakan pertanyaan besar.

Masalah kedua ialah bahwa pasar cenderung menoleransi eksternalitas. Keuntungan perusahaan bisa meningkat, sementara biaya kesehatan, biaya lingkungan, dan biaya sosial dipindahkan ke masyarakat luas. Polusi udara, krisis iklim, kerusakan tanah, stres kerja berlebihan, dan melemahnya kohesi sosial adalah contoh bagaimana "efisiensi" privat dapat dibayar mahal oleh publik. Dalam pengertian ini, pasar bukan sekadar mekanisme netral; ia selalu beroperasi dalam kerangka aturan, distribusi kekuasaan, dan batas moral yang ditetapkan atau dibiarkan oleh lembaga publik.

Masalah ketiga ialah konsentrasi kekuatan. Pasar bebas yang tidak diatur dengan baik sering bergerak menuju dominasi aktor besar, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun platform digital yang mengendalikan data, akses, dan perilaku. Ketika konsentrasi ini terjadi, pasar tidak lagi sepenuhnya kompetitif; ia berubah menjadi arena di mana yang kuat membentuk aturan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Karena itu, yang diperlukan bukan penghapusan pasar, melainkan penundukannya pada tujuan yang lebih tinggi. Pasar harus dilihat sebagai alat yang sangat penting, tetapi tetap sebagai alat. Ia baik sejauh memperluas kehidupan manusia, bukan sejauh ia mampu berkembang demi dirinya sendiri.

Negara dan Kepentingan Umum

Jika pasar bukan tujuan, apakah negara adalah jawabannya? Jawabannya: negara diperlukan, tetapi tidak cukup bila dibiarkan tanpa koreksi demokratis dan etis. Negara memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh pasar: menetapkan aturan, menyediakan barang publik, memungut pajak, melindungi kelompok rentan, membangun infrastruktur dasar, dan menjamin hak-hak warga. Tanpa negara yang efektif, pasar pun tidak dapat bekerja sehat, karena pasar memerlukan hukum, kontrak, keamanan, dan institusi.

Akan tetapi, negara juga memiliki bahaya sendiri. Negara dapat menjadi lemah, korup, tidak kompeten, atau tertawan oleh kepentingan sempit. Negara dapat menjadi terlalu birokratis sehingga membunuh inovasi, atau terlalu oligarkis sehingga kebijakannya hanya melayani mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Karena itu, pembelaan terhadap peran negara tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap negara apa adanya.

Dalam konteks pembangunan, negara yang dibutuhkan adalah negara yang cakap, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum. Ia bukan sekadar penguasa yang memerintah, tetapi arsitek institusional yang menciptakan ruang bagi pasar, komunitas, dan warga untuk berkembang secara adil. Negara seperti ini memahami bahwa anggaran bukan sekadar angka, melainkan ekspresi moral tentang siapa yang dianggap penting.

Kebutuhan akan negara yang efektif semakin nyata ketika kita melihat tekanan fiskal global. Bank Dunia melaporkan bahwa negara-negara berkembang membayar rekor US\$1,4 triliun untuk melayani utang luar negeri pada 2023, sementara biaya bunga mencapai US\$406 miliar—tingkat tertinggi dalam dua dekade. UNCTAD menambahkan bahwa utang publik global mencapai rekor US\$97 triliun pada 2023, dan sekitar 3 miliar orang hidup di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan. Dalam situasi seperti itu, negara sering dipaksa memilih antara melayani warga atau melayani kreditur. ([World Bank](#))

Persoalan ini memperlihatkan bahwa peran negara tidak dapat dipikirkan hanya dalam batas nasional. Negara-negara berkembang mungkin diminta membangun layanan publik, menanggulangi iklim, memperluas perlindungan sosial, dan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi mereka melakukannya dalam sistem keuangan internasional yang sering mahal dan tidak seimbang. Karena itu, pembelaan terhadap kepentingan umum hari ini juga berarti perjuangan untuk tata kelola global yang lebih adil.

Kritik terhadap Pembangunan yang Berpusat pada GDP

Salah satu persoalan paling serius dalam pembangunan modern adalah dominasi GDP sebagai ukuran keberhasilan. Tidak dapat disangkal bahwa GDP berguna. Ia membantu mengukur skala aktivitas ekonomi dan memberikan informasi penting bagi kebijakan makro. Tetapi GDP tidak dirancang untuk mengukur keadilan, kualitas kerja, kesehatan mental, kohesi sosial, keberlanjutan lingkungan, atau martabat manusia.

Sebuah negara bisa mencatat pertumbuhan tinggi sambil mempertahankan pekerjaan bergaji rendah, kota-kota yang tidak layak huni, kualitas pendidikan yang timpang, dan tingkat kecemasan sosial yang tinggi. Sebuah ekonomi bisa berkembang cepat karena ekstraksi sumber daya, tetapi meninggalkan kerusakan ekologis dan konflik komunitas. Dalam semua kasus itu, GDP bertambah, tetapi *human flourishing* belum tentu mengikutinya.

Data mutakhir menunjukkan secara jelas keterbatasan pertumbuhan semata. Bank Dunia mencatat bahwa hampir 700 juta orang atau 8,5 persen penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan sekitar 3,5 miliar orang—44 persen populasi global—masih hidup di bawah standar US\$6,85 per hari, yang lebih relevan bagi negara berpendapatan menengah atas. Berdasarkan trajektori saat ini, sekitar 622 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030 dan sekitar 3,4 miliar orang kemungkinan tetap hidup di bawah US\$6,85 per hari. Jika pertumbuhan tidak menjadi lebih cepat sekaligus lebih inklusif, dibutuhkan

puluhan tahun untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan lebih dari satu abad untuk mengangkat manusia di atas ambang US\$6,85 per hari. ([World Bank](#))

Laporan SDGs 2025 mempertegas masalah itu. Lebih dari 800 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2025, dan hanya satu dari lima negara yang berada di jalur untuk mengurangi separuh tingkat kemiskinan nasionalnya pada 2030. Artinya, sekalipun dunia menghasilkan lebih banyak kekayaan, distribusi peluang dan proteksi belum cukup kuat untuk mengubah kemakmuran makro menjadi kehidupan yang lebih baik secara meluas.

Karena itu, kita memerlukan ukuran kemajuan yang lebih kaya. Pendekatan pembangunan manusia, kemiskinan multidimensi, kualitas pekerjaan, akses layanan dasar, perlindungan sosial, ketahanan iklim, dan kualitas institusi harus diperlakukan sebagai pusat, bukan pelengkap.

Pekerjaan, Produktivitas, dan Martabat

Salah satu jembatan paling nyata antara ekonomi dan etika adalah dunia kerja. Bagi mayoritas manusia, martabat sehari-hari sangat terkait dengan pekerjaan: apakah mereka memiliki penghasilan yang cukup, rasa aman, waktu istirahat, peluang berkembang, dan penghormatan sosial. Karena itu, pasar tenaga kerja adalah arena di mana logika pasar paling sering diuji oleh pertanyaan tentang kemanusiaan.

Laporan ILO *World Employment and Social Outlook: Trends 2025* menyoroti bahwa pemulihan pasar kerja global menghadapi perlambatan pemulihan ekonomi, pengangguran kaum muda yang persisten, dan kesenjangan gender yang tetap kuat. ILO juga menekankan adanya tantangan struktural yang membentuk masa depan kerja secara global. Sementara itu, laporan SDGs 2025 menunjukkan bahwa 6,9 persen populasi pekerja masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2024. Dengan kata lain, memiliki

pekerjaan saja tidak selalu menjamin kehidupan yang layak. ([International Labour Organization](#))

Masalah lain yang sangat penting ialah informalitas. Di banyak negara, pekerjaan informal menjadi bantalan sosial yang menolong keluarga bertahan, tetapi juga menjadi tanda lemahnya perlindungan institusional. Dalam pekerjaan informal, seseorang bisa bekerja keras setiap hari namun tetap berada di tepi jurang kemiskinan. Ia bekerja, tetapi tidak aman. Ia produktif, tetapi tidak terlindungi. Ia hadir dalam statistik pekerjaan, tetapi belum tentu hadir dalam kebijakan kesejahteraan.

Di sini kita melihat perbedaan antara pekerjaan sebagai alat bertahan hidup dan pekerjaan sebagai wahana *human flourishing*. Pekerjaan yang memungkinkan manusia bertumbuh seharusnya menyediakan penghasilan memadai, keamanan dasar, peluang belajar, dan pengakuan atas harkat pekerja. Ketika pekerjaan hanya menjadi mekanisme bertahan yang rapuh, maka ekonomi mungkin tetap berjalan, tetapi masyarakat sedang menimbun ketidakpuasan sosial.

Bayangkan seorang pemuda di kota besar yang bekerja untuk dua aplikasi digital sekaligus, mengambil kerja lepas daring, dan sesekali dibantu keluarganya. Di atas kertas ia “bekerja”. Namun ia tidak tahu berapa pendapatan bulan depan, tidak memiliki asuransi yang memadai, dan tidak punya jaminan hari tua. Inilah contoh mengapa kebijakan ketenagakerjaan masa depan tidak cukup berhenti pada penciptaan lapangan kerja. Yang dibutuhkan ialah penciptaan pekerjaan yang bermartabat.

Perlindungan Sosial sebagai Fondasi Flourishing

Banyak orang menganggap perlindungan sosial sebagai biaya tambahan setelah pertumbuhan tercapai. Pandangan ini terlalu sempit. Perlindungan sosial sesungguhnya adalah infrastruktur moral sebuah masyarakat. Ia menyatakan bahwa manusia tidak boleh dibiarkan runtuh hanya karena sakit, kehilangan pekerjaan, cacat, menua, atau tertimpa bencana.

Tantangan global mutakhir memperlihatkan betapa pentingnya perlindungan sosial. Laporan SDGs 2025 menyebutkan bahwa kemajuan global menghadapi hambatan dari konflik, suhu yang terus memecahkan rekor, biaya layanan utang yang meningkat, dan kesenjangan pembiayaan pembangunan yang sangat besar. Dalam situasi seperti itu, rumah tangga miskin dan kelompok rentan adalah pihak yang pertama kali merasakan pukulan.

Perlindungan sosial juga erat kaitannya dengan produktivitas. Keluarga yang memiliki jaminan kesehatan, bantuan anak, asuransi pengangguran, atau pensiun dasar lebih mampu membuat keputusan jangka panjang: menyekolahkan anak, mencari kerja yang lebih baik, atau memulai usaha tanpa ketakutan absolut. Tanpa perlindungan sosial, masyarakat cenderung hidup dalam logika bertahan hari ini, bukan membangun masa depan.

Lebih jauh lagi, perlindungan sosial merupakan syarat bagi transisi yang adil. Reformasi energi, digitalisasi, dan perubahan struktur industri akan menciptakan pemenang dan pecundang baru. Bila negara tidak menyiapkan jaring pengaman, setiap reformasi akan ditolak sebagai ancaman. Namun bila perlindungan sosial hadir, perubahan dapat diterima sebagai proses yang meski tidak mudah, tetap memuliakan manusia.

Krisis Iklim dan Tantangan Dunia yang Layak Huni

Tidak mungkin berbicara tentang *human flourishing* tanpa berbicara tentang bumi yang layak huni. Kehidupan yang baik bukan hanya soal pendapatan dan hak sosial, tetapi juga soal udara yang dapat dihirup, air yang tersedia, panas yang masih dapat ditanggung, dan sistem pangan yang tidak runtuh oleh cuaca ekstrem.

Laporan UNEP *Adaptation Gap Report 2024* menekankan bahwa kemajuan pembiayaan adaptasi masih terlalu lambat untuk menutup jurang besar antara kebutuhan dan aliran dana, dengan kesenjangan pembiayaan adaptasi yang diperkirakan berada pada kisaran US\$187–359 miliar per

tahun. Sementara itu, laporan SDGs 2025 menggambarkan dunia yang terhambat oleh suhu yang terus memecahkan rekor dan pembiayaan yang tidak memadai. Ini berarti krisis iklim bukan ancaman abstrak masa depan; ia sudah menjadi persoalan pembangunan hari ini. ([UNEP - UN Environment Programme](#))

Dari sudut etika, masalah iklim memperlihatkan keterbatasan paling jelas dari ekonomi yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Emisi dapat dihasilkan hari ini, sementara biaya sesungguhnya dipikul oleh generasi mendatang, komunitas pesisir, petani kecil, penduduk kawasan kering, dan negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis itu. Ini bukan hanya kegagalan pasar, tetapi juga kegagalan keadilan.

Karena itu, masa depan dunia membutuhkan transisi hijau yang adil. Kita tidak dapat memilih antara manusia dan planet, sebab manusia sendiri hidup di dalam planet. Tetapi kita juga tidak boleh menjalankan agenda hijau dengan cara yang membebani kelompok rentan secara tidak proporsional. Pajak karbon, reformasi energi, relokasi industri, dan penyesuaian rantai pasok harus disertai perlindungan sosial, pelatihan kerja, pembiayaan murah, dan investasi dalam ketahanan komunitas.

AI, Teknologi, dan Masa Depan Kebebasan Manusia

Salah satu penanda zaman kita adalah hadirnya AI sebagai kekuatan ekonomi dan sosial baru. AI menjanjikan peningkatan produktivitas, analitik yang lebih canggih, diagnosis medis yang lebih baik, serta transformasi besar dalam pendidikan, manufaktur, jasa, dan administrasi publik. Namun AI juga membawa risiko: penggantian kerja, penguatan monopoli digital, diskriminasi algoritmik, pengawasan yang semakin halus, dan konsentrasi kekuasaan data.

UNDP dalam *Human Development Report 2025* secara tegas mengingatkan bahwa inti persoalannya bukan apakah AI menjadi semakin hebat, melainkan bagaimana pilihan manusia akan menentukan manfaatnya.

Laporan itu juga menekankan perlambatan kemajuan pembangunan manusia secara global dan pentingnya membentuk jalur baru yang memberi semua negara kesempatan untuk berkembang di dunia dengan AI. ([Human Development Reports](#))

Dalam kerangka *human flourishing*, AI seharusnya diarahkan untuk memperluas kapabilitas manusia, bukan menyusutkannya. Teknologi yang baik adalah teknologi yang membuat guru mengajar lebih baik, dokter mendiagnosis lebih akurat, petani mengelola risiko lebih cerdas, birokrasi lebih responsif, dan warga lebih berdaya. Sebaliknya, teknologi yang buruk adalah teknologi yang menjadikan manusia transparan bagi sistem, tetapi sistem tetap gelap bagi manusia.

Maka, tata kelola AI harus menyentuh tiga hal. Pertama, distribusi manfaat: siapa yang memperoleh produktivitas dan keuntungan? Kedua, distribusi risiko: siapa yang kehilangan pekerjaan, otonomi, atau privasi? Ketiga, akuntabilitas: siapa yang bertanggung jawab ketika sistem algoritmik menimbulkan kerugian? Tanpa jawaban yang etis dan institusional, AI dapat mempercepat ekonomi tanpa memperdalam kemanusiaan.

Krisis Pembiayaan Pembangunan dan Ketidakadilan Global

Perdebatan tentang etika pembangunan sering kali terdengar mulia, tetapi akan tampak hampa bila kita mengabaikan masalah pembiayaan. Banyak negara berkembang menghadapi situasi paradoks: mereka diminta mempercepat pendidikan, kesehatan, adaptasi iklim, digitalisasi, dan pengurangan kemiskinan, tetapi pada saat yang sama dibebani ruang fiskal yang sempit, biaya modal yang mahal, dan utang yang menekan.

Laporan SDGs 2025 menyebut adanya kesenjangan pembiayaan pembangunan sekitar US\$4 triliun per tahun di negara berkembang. OECD juga menegaskan bahwa kesenjangan tahunan pembiayaan pembangunan berkelanjutan telah meningkat dari US\$2,5 triliun menjadi US\$4 triliun, dipicu oleh perubahan iklim, konflik lokal, dan ketidakpastian geopolitik.

Lebih jauh lagi, OECD melaporkan bahwa bantuan pembangunan resmi turun 7,1 persen pada 2024, penurunan pertama setelah lima tahun berturut-turut meningkat. ([UNSD](#))

Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa dunia tidak hanya menghadapi ketimpangan pendapatan, tetapi juga ketimpangan kapasitas pembangunan. Negara maju memiliki biaya pinjaman lebih rendah, institusi lebih kuat, dan ruang fiskal lebih besar. Negara berkembang justru sering membayar mahal untuk bertahan. Maka, seruan agar semua negara “berlari lebih cepat” menjadi tidak adil bila garis start dan bobot beban mereka berbeda jauh.

Dalam perspektif *human flourishing*, reformasi tata kelola global menjadi keharusan, bukan opsi. Negara-negara berkembang memerlukan restrukturisasi utang yang lebih cepat, pembiayaan pembangunan yang lebih murah, perluasan kapasitas lembaga multilateral, dan sistem perpajakan internasional yang lebih adil. Tanpa itu, dunia akan terus berbicara tentang pembangunan inklusif sambil mempertahankan sistem yang mempersulitnya.

Menuju Arsitektur Baru Pembangunan Dunia

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, masa depan dunia memerlukan arsitektur pembangunan yang baru. Arsitektur ini tidak menolak pasar, tetapi menolak pasarisme. Ia tidak menolak negara, tetapi menolak etatisme yang kosong. Ia menempatkan etika sebagai horizon yang membimbing pilihan ekonomi dan politik.

Pertama, tujuan pembangunan harus dirumuskan ulang. Ukuran keberhasilan tidak boleh hanya bertumpu pada pertumbuhan GDP, tetapi juga pada kualitas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, rasa aman, kualitas lingkungan, akses digital yang adil, dan kekuatan institusi sosial. Dengan kata lain, pertumbuhan harus dipandang sebagai sarana untuk memperluas hidup yang bernilai.

Kedua, pasar perlu dibatasi secara cerdas. Regulasi persaingan, tata kelola platform, perlindungan pekerja, perlindungan data, serta penegakan standar lingkungan harus diperkuat. Pasar yang dibiarkan tanpa batas akan cenderung menghisap lebih banyak nilai dari manusia dan alam daripada yang seharusnya.

Ketiga, negara perlu ditransformasikan menjadi negara yang produktif dan berorientasi publik. Negara semacam ini tidak sekadar mengoreksi kegagalan pasar, tetapi juga membangun kapasitas jangka panjang: pendidikan bermutu, riset, infrastruktur dasar, transformasi industri, perlindungan sosial, dan kesiapan menghadapi iklim.

Keempat, kerja layak harus menjadi pusat agenda. Dunia tidak cukup menciptakan pekerjaan; dunia harus menciptakan pekerjaan yang memungkinkan manusia bertumbuh. Itu berarti upah yang layak, keamanan sosial, ruang belajar, dan perlakuan hormat.

Kelima, teknologi harus diatur untuk manusia. AI dan digitalisasi harus membantu memperluas pilihan dan kebebasan, bukan mempersempitnya. Negara dan masyarakat harus memiliki kapasitas untuk mengawasi, mengaudit, dan mengarahkan teknologi demi kepentingan umum.

Keenam, solidaritas global perlu dipulihkan. Dunia yang semakin terhubung tetapi semakin proteksionis akan sulit menghasilkan pembangunan yang adil. Bila bantuan menurun, utang naik, dan pembiayaan hijau tidak memadai, maka pernyataan tentang masa depan bersama akan terdengar semakin hampa.

Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa tantangan utama zaman kita bukan hanya bagaimana membuat ekonomi tumbuh, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan itu sungguh mengarah pada *human flourishing*. Pasar sangat penting, tetapi tidak memiliki kompas moral. Negara sangat diperlukan, tetapi tidak selalu otomatis adil. Keduanya harus ditempatkan di bawah

horizon yang lebih tinggi: manusia yang hidup bermartabat dalam masyarakat yang adil dan dunia yang tetap layak dihuni.

Perkembangan global mutakhir menunjukkan dengan jelas bahwa model pembangunan yang terlalu percaya pada pertumbuhan dan efisiensi tidak lagi memadai. Pertumbuhan global sedang melemah, pengurangan kemiskinan berjalan sangat lambat, pekerjaan layak belum tersebar luas, utang menekan ruang fiskal, bantuan pembangunan menurun, dan pembiayaan untuk SDGs serta adaptasi iklim masih jauh dari cukup. Semua ini memperlihatkan bahwa krisis pembangunan hari ini adalah sekaligus krisis moral: dunia belum cukup berhasil menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. ([IMF](#))

Karena itu, masa depan dunia harus dibangun di atas sintesis baru. Pasar perlu dipertahankan sebagai sarana inovasi dan produktivitas, tetapi dibatasi oleh keadilan. Negara perlu diperkuat sebagai penjaga kepentingan umum, tetapi dijaga oleh akuntabilitas. Teknologi perlu dimanfaatkan, tetapi diarahkan oleh nilai kemanusiaan. Dan pembangunan perlu diukur bukan hanya dari apa yang dihasilkan, melainkan dari siapa yang benar-benar menjadi lebih hidup, lebih aman, lebih bebas, dan lebih bermakna.

Pada akhirnya, kualitas sebuah peradaban tidak hanya diukur dari besarnya kekayaan yang ia ciptakan, tetapi dari cara ia memperlakukan manusia, dari keberanian politiknya untuk melindungi yang rapuh, dan dari kebijaksanaannya menata ekonomi agar kembali melayani kehidupan. Di situlah *human flourishing* menemukan maknanya yang terdalam.

Artificial Intelligence (AI): Teknologi komputasional yang memungkinkan mesin menjalankan tugas tertentu yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, prediksi, atau generasi bahasa.

Capability/Kapabilitas: Kemampuan nyata seseorang untuk melakukan atau menjadi sesuatu yang bernilai dalam hidupnya.

Eksternalitas: Dampak samping dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar, seperti polusi atau gangguan kesehatan.

Etika ekonomi: Cabang refleksi normatif yang menilai apakah aktivitas ekonomi, kebijakan, dan institusi berjalan sesuai dengan keadilan dan martabat manusia.

Human development/Pembangunan manusia: Pendekatan pembangunan yang menekankan perluasan pilihan, kebebasan, dan kualitas hidup manusia.

Human flourishing: Keberhasilan hidup manusia secara utuh, mencakup dimensi material, sosial, moral, dan eksistensial.

Informalitas: Kondisi kerja atau usaha yang tidak sepenuhnya tercakup dalam aturan, kontrak, dan perlindungan sosial formal.

Keadilan sosial: Keadaan ketika hak, kesempatan, dan sumber daya dibagikan secara lebih adil dalam masyarakat.

Martabat manusia: Nilai intrinsik yang dimiliki setiap manusia dan membuatnya tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai alat.

Pekerjaan layak: Pekerjaan yang menyediakan pendapatan memadai, keamanan dasar, perlindungan sosial, dan penghormatan terhadap pekerja.

Perlindungan sosial: Sistem kebijakan dan program yang membantu individu dan rumah tangga menghadapi risiko seperti sakit, pengangguran, usia tua, atau kemiskinan.

SDGs: Sustainable Development Goals, yaitu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan global yang ditetapkan PBB hingga 2030.

Transisi yang adil: Proses perubahan menuju ekonomi yang lebih hijau dan modern dengan tetap melindungi kelompok yang rentan terdampak.

Referensi (APA 7)

Aristotle. (2009). *The Nicomachean ethics* (W. D. Ross & L. Brown, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 4th century BCE)

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ILO.

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, April 2025: A critical juncture amid policy shifts*. IMF.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Belknap Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Global outlook on financing for sustainable development 2025*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Official development assistance 2024 figures*. OECD.

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press. (Original work published 1944)

Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *A world of debt 2024: A growing burden to global prosperity*. UNCTAD.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

United Nations Environment Programme. (2024). *Adaptation gap report 2024*. UNEP.

United Nations Statistics Division. (2025). *The sustainable development goals report 2025*. United Nations.

World Bank. (2024). *International debt report 2024*. World Bank.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 13 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69dc695f-7cd8-83a1-b386-2bca9314b18e>